

RELASI ANTARA IDEOLOGI DENGAN MEDIA MASSA

*Abdul Basit**

Abstract

The progress of mass media is influenced by the development of social theories. One interesting case to be discussed is the relation between ideology and mass media. There are three main groups which have different views on the relation between ideology and mass media. Marxist states that mass media is an institution which can be used to socialize false ideology built by borjuis class. Another group, the liberal pluralist, states that mass media is an institution which is free from interventions of state, political parties, and other repressing groups so that ideology has no relationship with mass media. The third, the critical group, states that texts produced by mass media is not free from any conflicts and interests. This group tries to rebuild the relationship between ideology and mass media. However, the ideology developed by this group is not an fight ideology or false awareness, but an ideology emphasizing on the articulation of meaning or ideology which functions as a discussion and logical social process.

Keywords:

ideology, mass media, Marxism, pluralistic liberalism, critical

Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarahnya, kehadiran media massa tidak terlepas dari keberadaan manusia. Sejak ditemukannya mesin cetak oleh

* Penulis adalah kandidat doktor (S-3) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen Tetap Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Johann Gutenberg pada tahun 1440 dan berkembangnya revolusi industri di Barat, perkembangan media massa cukup pesat. Produksi dan sirkulasi bentuk-bentuk simbol yang terjadi di dalam masyarakat pada saat itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan industri media massa. Oleh karena itu, studi tentang media massa tidak akan terlepas dari studi tentang masyarakat. Menurut Leo W. Jeffres, ada dua hubungan utama yang tidak bisa dipisahkan antara media dengan masyarakat, yakni media menggambarkan masyarakat dan media massa mempengaruhi masyarakat.¹

Munculnya kapitalisme industri di Eropa serta wilayah lainnya menimbulkan perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang budaya, kepercayaan dan praktek keagamaan serta magis yang sebelumnya merupakan tradisi yang berlangsung di kalangan masyarakat pra-industri mengalami penurunan. Menurunnya peran agama dan magis menjadi landasan kuat munculnya sistem kepercayaan sekuler atau ideologi yang diarahkan untuk memobilisasi tindakan politik tanpa mengacu kepada nilai dan kehidupan yang lain. Dalam konteks ini, ideologi dipahami sebagai sistem kepercayaan sekuler yang berfungsi untuk memobilisasi dan memberi legitimasi.²

Berdasarkan pemahaman ini, akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 merupakan titik awal dimulainya era ideologi seperti yang ditandai dengan munculnya revolusi politik yang terjadi di Perancis dan Amerika serta mewabahnya doktrin-doktrin politik atau isme dari sosialisme dan komunisme hingga liberalisme, konservatisme, dan nasionalisme.

Berkembangnya berbagai ideologi di kalangan masyarakat berpengaruh besar terhadap studi media massa karena kehadiran media massa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Media massa berada di tengah realitas sosial (masyarakat) yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Media massa merupakan kekuatan raksasa yang dapat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media massa sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan, media

¹ Leo W. Jeffres, *Mass Media Processes and Effects* (Illinois: waveland Press Inc, 1986), hal. 13.

² John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global* (Yogyakarta: Ircisod, 2004), hal. 51.

terlebih dalam posisinya sebagai institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik. Hanya mereka yang mempunyai akses kepada informasi yang bakal menguasai percaturan kekuasaan. Dengan berbagai kelebihan tersebut, media massa dianggap sebagai kekuasaan keempat (*fourth estate*), selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Harold Lasswell yang dikutip oleh William L. Rivers, di setiap masyarakat mulai dari yang paling primitif hingga yang terkompleks, media massa memiliki empat fungsi yaitu: penjagaan lingkungan yang mendukung, pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan pengalihan warisan sosial, serta sumber hiburan.³

Dalam menjalankan fungsinya, media masa tidak berada dalam kondisi yang vakum, bebas, dan independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa atau dengan perkataan lain ada "ideologi" yang saling bertarung di media massa. Berdasarkan pemikiran tersebut, para pemikir dan ahli media massa mencoba menganalisis adanya relasi antara ideologi dengan media massa.

Dalam tulisan ini akan diuraikan tiga kelompok yang berbeda dalam memandang relasi ideologi dengan media massa. Kelompok pertama adalah kelompok marxis yang memandang media massa sebagai bagian dari arena pertarungan ideologi dari berbagai kelas dan kelas yang dominanlah yang melakukan kontrol terhadap media. Kelompok kedua adalah kelompok liberal-pluralis yang memandang media massa sebagai sistem organisasi yang independen dan bebas dari negara, partai politik dan institusi penekan. Karenanya, kelompok ini meruntuhkan pemahaman tentang adanya hubungan antara ideologi dengan media massa. Kelompok ketiga adalah kelompok kritis yang memandang media massa bukan hanya pada teks yang dihasilkan, melainkan juga perlu dilihat bagaimana konteks media massa tersebut diproduksi. Kelompok ini mencoba menghadirkan kembali relasi antara ideologi dengan media massa dalam bentuk yang berbeda dengan pandangan kaum marxis.

³ William L. Rivers dkk, *Media Massa dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 34.

Sebelum penulis lebih jauh membahas ketiga kelompok tersebut, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dan perkembangan konsep ideologi serta karakteristik media massa. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran deologi dan media massa.

Pengertian dan Perkembangan Konsep Ideologi

Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy (1754-1836), seorang psikolog Prancis berpaham materialis. Pada tahun 1796, ia menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui benda-benda dalam dirinya, tetapi hanya melalui ide-ide yang terbentuk berdasarkan sensasi kita terhadap benda-benda tersebut. Jika kita akan menganalisa ide dan sensasi secara sistematis, kita harus memiliki latar belakang seluruh pengetahuan ilmiah yang kuat dan dapat menarik kesimpulan secara lebih praktis.⁴ Dengan demikian, ideologi dimaksudkan sebagai suatu metode untuk mengetahui asal-usul pikiran yang timbul dalam otak manusia atau ideologi adalah ilmu tentang ide.⁵

Gagasan Destutt de Tracy ini pada awalnya mendapatkan simpati dari Napoleon, tetapi dalam perkembangan selanjutnya Napoleon mengejek pretensi ideologi. Menurutnya, ideologi merupakan doktrin spekulatif abstrak yang tidak memiliki hubungan dengan upaya perealisasi kekuasaan politik.⁶ Ideologi pada zaman Napoleon ini mengalami politisasi. Setelah Napoleon runtuh dari kekuasaannya, pengertian ideologi berubah menjadi “gagasan” itu sendiri, yaitu sebetuk ide yang selalu disalahpahami dan dipisahkan dari realitas praktek kehidupan politik.⁷

Selanjutnya, konsep ideologi mendapatkan rumusan baru dari Karl Marx menjadi sebuah kerangka teoritis dan program politik yang secara mendalam dipengaruhi oleh semangat pencerahan. Bagi Marx, ideologi adalah “kesadaran palsu” yang terdapat dalam benak manusia karena

⁴ John B. Thompson, *Kritik...*, hal. 52.

⁵ M. Dawam Rahardjo, “Topik Kita”, dalam *Majalah Prisma* No. 6, 1985, Tahun XIV, hal. 2.

⁶ John B. Thompson, *Kritik...*, hal. 54.

⁷ *Ibid*, hal. 55

kesalahan menafsirkan keadaan masyarakat. Kesalahan pengertian itu menyebabkan orang tidak melihat kontradiksi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga masyarakat secara tidak sadar melayani kepentingan kelas yang berkuasa.⁸

Rumusan lain dari konsep ideologi datang dari Karl Mannheim dalam bukunya *Ideologi dan Utopia*. Konsep ideologi yang dipahami oleh Marx bersifat negatif, sementara ideologi yang dipahami oleh Mannheim bersifat netral. Bagi Mannheim yang dikutip oleh Thompson bahwa ideologi adalah ide yang penuh pertentangan dengan realitas dan tidak dapat diwujudkan dalam praktek. Konkretnya, ideologi sulit dibedakan dengan utopia, karena perbedaan mensyaratkan konsepsi yang jelas tentang realitas sosial-historis dan hipotesa tentang apakah suatu ide dapat diwujudkan atau tidak.⁹

Sejalan dengan Mannheim yang menyatakan ideologi bersifat netral dikemukakan oleh Gramsci. Gramsci membagi ideologi menjadi dua, ideologi 'arbitrer' dan ideologi 'organis'.¹⁰ Kesadaran palsu bisa terjadi pada ideologi arbitrer, sedangkan pada ideologi organis bersifat netral. Ideologi yang organis adalah suatu konsepsi tentang dunia yang secara implisit dimanifestasikan dalam kesenian, hukum, media massa, kegiatan ekonomi, dan semua manifestasi individual maupun kolektif. Ideologi bukan hanya suatu sistem gagasan, tetapi juga mempunyai kapasitas untuk mengilhami tindakan kongkrit dan memberikan kerangka orientasi bagi tindakan itu. Atas landasan itu manusia bergerak dan memperoleh kesadaran akan kedudukannya dan perjuangannya dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, ideologi menciptakan manusia sebagai aktor sejarah dan bukan ditentukan oleh sejarah.

Penjelasan dari Gramsci ini diperkuat oleh John Thompson dengan mengembangkan kerangka kerja ideologi melalui konstruksi simbol. Menurutnya, ada lima model cara kerja ideologi yaitu: legitimasi, penipuan, unifikasi, fragmentasi, dan reifikasi. Berikut ini bagan yang dibuat oleh Thompson:

⁸ M. Dawam Rahardjo, "Topik Kita"....., hal. 2

⁹ John B. Thompson, *Kritik*....., hal. 82.

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, "Topik Kita"....., hal. 2

No	Model Umum	Bentuk Strategi Konstruksi Simbol
1	Legitimasi	Rasionalisasi
		Universalisasi
		Narativisasi
2	Penipuan	Pemindahan
		Eufemisasi
		Kiasan (seperti anekdot, metonimi, metafor)
3	Unifikasi	Standardisasi
		Simbolisasi dari kesatuan
4	Fragmentasi	Diferensiasi
		Ekspurgasi yang lain
5	Reifikasi	Naturalisasi
		Eternalisasi
		Nominalisasi/pasivisasi

Karakteristik media Massa

Proses media massa pada dasarnya terjadi ketika sebuah organisasi sumber memproduksi sebuah pesan dan secara mekanis mentransmisikan pesan tersebut melalui saluran media sehingga terbentuk menjadi media massa.¹¹ Selanjutnya, media massa dikomunikasikan melalui proses yang dapat terjadi dalam dua level, yakni pada level pesan (*one-way process*) dan pada level seleksi (*two-way process*). Pada level pesan, proses media massa terjadi dari sumber kepada audiens. Berbeda dengan komunikasi interpersonal, umpan balik media massa bersifat tidak langsung tetapi tertunda (*delayed feedback*). Pada level seleksi, baik media maupun audiens melakukan seleksi. Media akan menyeleksi jumlah audiensnya dan audiens akan menyeleksi isi media yang cocok untuknya.¹²

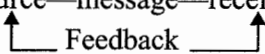
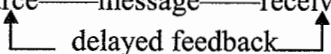
¹¹ Cassandra L. Book (Ed), *Human Communication: Principles, Contexts, and Skills* (New York: St. Martin Press, 1980), hal. 198.

¹² Joseph A. Devito, *Human Communication The Basic Course*, edisi ke-5, New York: Harper Collins Publishers, 1991, hal. 457.

Onong Uchjana Effendy dalam bukunya *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* menyebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh media massa¹³, yaitu:

1. media massa bersifat umum artinya pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa adalah terbuka untuk semua orang.
2. komunikasi bersifat heterogen artinya massa dalam media massa terjadi dari orang-orang yang heterogen yang meliputi penduduk yang bertempat tinggal dalam kondisi yang berbeda, dengan kebudayaan yang beragam, berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dan mempunyai pekerjaan yang beragam.
3. media massa menimbulkan keserempakan yakni keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh.
4. Hubungan komunikator-komunikan bersifat non-pribadi. Sifat non-pribadi ini timbul disebabkan oleh teknologi penyebaran yang massal dan sebagian lagi karena syarat-syarat peranan komunikator yang bersifat umum.

Sementara itu, Leo W. Jeffres memberikan gambaran yang singkat tentang karakteristik media massa dibandingkan komunikasi antar pribadi sebagai berikut¹⁴.

Interpersonal communication	mass communication
Source—message—receiver	source—message—receivers
	
Single source	many participants as source
Single receiver	many receivers
Homogeneity	heterogeneity (diverse receivers)
Immediate feedback	delayed feedback (if any)

Pandangan Kelompok Marxis Tentang Media dan Relasinya dengan Ideologi

Akar dari kemunculan ideologi di media massa tidak terlepas dari konsep kebebasan berbicara bagi setiap warga negara. Kebebasan berbicara ini dikemas dalam bentuk media. Kebebasan berbicara sebagai

¹³ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 81-83.

fenomena sosial tidak bisa dilepaskan dari pandangan kaum marxis tentang realitas sosial sebagai realitas berlawanan. Pandangan ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa pembagian kerja di masyarakat akan menimbulkan pemisahan pekerjaan. Pemisahan itu menimbulkan konflik di antara mereka. Berbagai macam fase perkembangan pembagian kerja memunculkan perbedaan bentuk dan konsekuensi. Selain itu, pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok atau bersama akan terjadi.

Dalam pandangan Marx, pertentangan terjadi antara kubu kaum borjuis dengan kaum proletar. Kontradiksi antara dua kubu ini sulit untuk didamaikan. Penyelesaiannya hanya dilakukan melalui ideologi.¹⁵ Ideologi yang digunakan adalah ideologi yang bersumber dari kelas penguasa yaitu kaum borjuis. Ideologi digunakan oleh kaum borjuis untuk menjelaskan suatu keadaan atau struktur kekuasaan sehingga orang menganggapnya sah atau diterima oleh kaum proletar. Dalam hal ini, ideologi menjadi pelayan kepentingan kelas berkuasa.

Ideologi semacam ini terus menerus disosialisasikan agar menjadi gagasan, norma, dan nilai yang bersifat universal dan diyakini kebenarannya. Media massa menjadi titik pusat yang penting dalam menyebarkan kesadaran palsu yang mengarahkan orang untuk mempercayai 'apapun adalah benar'. Media massa merupakan salah satu alat yang ampuh untuk melakukan sosialisasi ideologi kepada masyarakat. Mengingat media massa sebagai institusi pembuat opini bisa dipegang oleh siapa saja baik individu maupun kelompok yang ada di masyarakat, maka keberadaan media massa perlu dikontrol oleh kelas yang berkuasa.

Gagasan pengontrolan media massa ini bersumber dari Marx. Menurutnya, media massa perlu dikontrol oleh kelas penguasa agar kebebasan media massa tidak dijadikan sebagai alat untuk melawan kekuasaan yang ada.¹⁶ Gagasan Marx ini bersumber dari pengetahuan dan pengalamannya ketika dia tinggal di Inggris selama 10 tahun dan menjadi koresponden *New York Tribune*. Waktu menjadi koresponden, Marx pernah

¹⁵ Johnson D.P., *Teori Sosial Klasik dan Modern I*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 34.

¹⁶ Stuart Allam (Ed0, *Issues in Cultural and Media Studies*, (philadelphia: Open University Press, 1999), hal. 51

mengirimkan tulisan ke media tersebut, tetapi tulisan tersebut lama sekali dimuatnya. Menurutnya, faktor penyebabnya adalah adanya kontrol yang ada baik dari pengelola (manajer) media maupun pemilik media.

Gagasan Marx ini dalam perkembangan selanjutnya mendapatkan respons dari para pemikir, khususnya ketika media massa telah menjadi industri. Pertanyaan mendasarnya apakah yang dikontrol itu pemilik industri media atau hanya pengelola (manager) media massa. Bagi Marx, kontrol terhadap media akan menjadi efektif manakala yang dikontrol adalah pemilik media karena pemilik media memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan dan dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk memilih manager. Dengan demikian, menurut Marx, manajer tidak memiliki otonomi luas dalam mengembangkan media massa.¹⁷

Pandangan Kelompok Liberal-Pluralis Tentang media dan Relasinya dengan Ideologi

Pandangan Kelompok liberal-pluralis tentang media tidak terlepas dari gagasan tentang adanya falsafah kebebasan yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, gagasan ini muncul karena para ahli komunikasi, khususnya Amerika, lebih memfokuskan penelitiannya pada pemecahan masalah kriminal, prostitusi, dan masalah-masalah sosial lainnya yang timbul akibat industrialisasi dan urbanisasi yang berlangsung sangat cepat. Dari sanalah para ahli komunikasi mengembangkan studi media yang berhubungan dengan fungsi dan efek media massa.

Menurut kaum liberal-pluralis, fungsi media sebagai kekuasaan keempat (*fourth estate*) memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Media massa merupakan sumber informasi yang bebas dan tidak bergantung kepada pemerintah.¹⁸ Sumber informasi yang dibuat oleh media massa berasal dari berbagai gagasan yang bebas dan terbuka bagi siapapun. Karenanya, kekuatan media massa bergantung kepada opini mayoritas atau masyarakat.¹⁹

¹⁷ Michael Gurevitch dkk (Ed), *Culture Society and the Media*, London: Methuen & Co, Ltd, 1982, hal. 130.

¹⁸Ibid, hal. 31.

¹⁹ Ibid, hlm. 40.

Untuk tercapainya fungsi tersebut, media massa perlu melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan agar acara, pengolahan, penyajian, dan penyebarannya menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itulah diperlukan pemahaman mengenai efek media massa. Efek media massa diteliti dengan cara melihat adanya perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengaruh media massa. Dalam penelitian biasanya digunakan pendekatan ilmu sosial yang positivistik. Adapun fokus yang diteliti lebih kepada efek budaya, politik, dan sosial.

Terkait dengan efek budaya, media massa digambarkan sebagai pendidik terbesar, saluran yang membawa budaya kepada masyarakat dan membantu dalam menjembatani jurang pemisah budaya dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, organisasi media massa dianggap sebagai wakil dan struktur kekuatan budaya lokal dan budaya luar yang membantu menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dan dapat mengembangkan budaya yang menjadi milik bersama.²⁰

Sementara itu, efek politik media, yakni media massa merupakan aktor yang efektif dalam proses pencapaian dan uji coba kekuatan. Pada pemilihan umum, media massa tidak hanya digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pemilih, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Lebih jauh lagi, media menunjukkan kemampuannya dalam memberikan informasi politik, menciptakan image politik, memberikan efek kognitif secara langsung, membantu menyusun agenda politik, dan banyak mempengaruhi aspek afektif dan psikomotorik manusia.²¹ Begitu juga media memiliki efek sosial, yakni media massa mampu mempengaruhi perilaku dan persepsi anak-anak, remaja dan orang tua dalam bersikap dan berperilaku.²²

Pandangan yang lebih menekankan efek media massa mendapatkan tanggapan dari aliran Frankfurt yang memandang pesimis terhadap efek media massa. Kalau pun terjadi efek, maka tidak terjadi efek secara langsung, melainkan dimediasi oleh proses sosial yang lainnya.²³

²⁰ Leo W. Jeffres, *Mass Media.....*, hal. 325.

²¹ *Ibid*, hal. 286

²² *Ibid*, hal. 245-246

²³ Michael Gurevitch dkk (Ed), *Culture.....*, hal. 58.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika masyarakat Amerika mengalami perubahan dan cenderung kepada totalitarian, ilmuwan sosial merespons dengan karya-karya yang membicarakan tentang pluralisme. Dalam era ini, perhatian penelitian tidak terfokus kepada perdebatan antara kaum yang optimis dengan kaum yang pesimis tentang efek media massa. Perhatian lebih terfokus kepada perdebatan yang bersifat teoritis dan metodologis, yakni perdebatan antara model Eropa yang bersifat historis dan filosofis dengan pendekatan model Amerika yang bersifat empiris, *behavioural*, dan saintifik.

Bagi kelompok pluralis, dua pendekatan ini dalam operasionalisasinya digabungkan. Ketika mengkaji efek media massa, kaum pluralis bertitik tolak dulu dari pemahamannya tentang masyarakat. Menurutnya, masyarakat dibentuk berdasarkan konsensus pada norma-norma yang disepakati bersama oleh masyarakat. Hubungan antara media massa dengan konsensus normatif ini hanya berkisar pada tataran nilai-nilai. Menurut sistem sosial Parsons, nilai memainkan peran penting, sebagai mekanisme penyatuan dalam pembentukan tatanan sosial bersama. Sebelum pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang menjadi struktur dan isi dari nilai-nilai, bagaimana nilai-nilai tersebut diproduksi dan bagaimana masyarakat kapitalis industri modern mengembangkannya secara dinamis dapat dijelaskan, terlebih dahulu ada kesepakatan terbuka tentang inti sistem nilai tersebut.

Objek kajian kelompok pluralis tentang efek media massa terhadap masyarakat: pertama, pada saat kampanye atau kerangka kerja dalam pengambilan keputusan, yakni pengaruhnya langsung kepada perubahan individu dan secara tidak langsung pada pembentukan opini yang memimpin. Kedua, pada perbedaan perilaku yang dapat diobservasi secara empiris. Dari sinilah pesan media dibaca dan dikoding dalam term-term yang bias dari komunikator. Penelitian tentang pesan ini, kaum pluralis, menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan di kalangan masyarakat Amerika ketika menganalisis komunikasi massa terkait erat dengan hubungan antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Dengan kecenderungan tersebut, maka para peneliti dalam menganalisis media massa lebih memfokuskan kepada faktor-faktor psikologis dari produser media massa dan juga menganalisis tentang efek media massa terhadap audiens.

Dalam operasionalisasinya, *content analysis* menekankan pada wujud dari isi pesan media massa. Caranya menggunakan kategori-kategori konseptual tertentu yang berkenaan dengan isi media. Kemudian secara kuantitatif dilakukan penilaian tentang ada atau tidak adanya pesan yang masuk dalam kategori-kategori tersebut. Kelebihan yang dimiliki dari pendekatan *content analysis* adalah mampu melakukan investigasi isi media secara sistematis, tetapi keterbatasannya terjadi di dalam menganalisis makna dari pesan media yang spesifik.

Pada masa-masa selanjutnya, yakni pada akhir tahun 1960 dan tahun 1970-an minat para peneliti kelompok pluralis beralih ke penelitian efek media massa tak langsung. Kelompok ini memperluas cakrawala pandangannya tentang efek media massa di luar penataan agenda (*agenda setting*). Dalam hal ini, penelitian lebih menekankan pada efek negatif dari media massa, misalnya efek yang timbul akibat menonton siaran televisi dalam bentuk perilaku kekerasan dan perilaku seksual di kalangan remaja.

Berkenaan dengan organisasi media, kelompok liberal Pluralis menyatakan bahwa sistem organisasi media harus bebas dari negara, partai politik, dan institusi-institusi kelompok penekan. Organisasi media diberikan keleluasaan untuk mengembangkan institusinya. Berkembang dan tidaknya organisasi media tergantung pada elite manajer yang profesional dan bebas dari intervensi siapapun. Demikian juga, masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan media massa mana yang layak dan sesuai untuk dikonsumsi. Masyarakat dan organisasi media tidak saling intervensi. Kedua-duanya berada dalam posisi yang sejajar.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kelompok liberal pluralis dalam kajian media massa lebih menekankan kepada peran dan efek media massa bagi masyarakat. Aliran ini tidak menyinggung adanya relasi antara ideologi dengan media massa. Karena media massa merupakan institusi yang bebas dari negara, partai politik, dan institusi-institusi lain yang menekan keberadaan media massa.

Pandangan Kelompok Kritis Tentang Media dan Relasinya dengan Ideologi.

Pandangan kelompok kritis dibangun oleh tokoh-tokoh komunikasi yang terkenal seperti Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Max

Horkheimer. Mereka mendirikan *The Institute for Social Research* pada tahun 1923 di Frankfrut.²⁴ Kelompok ini dikenal dengan Aliran Frankfrut. Kelompok ini menentang pendapat yang dikemukakan oleh kelompok Marxis dan kelompok liberal-pluralis tentang media massa.

Kelompok Kritis muncul ketika terjadi aksi-aksi mahasiswa di Eropa Barat pada tahun 1960-an, khususnya di Jerman pada tahun 1967 yang menuntut demokratisasi universitas. Aksi-aksi itu kemudian dilancarkan juga kepada media massa, karena para mahasiswa merasa kecewa akan pemberitaan yang disiarkan media massa terutama surat kabar dan majalah yang dianggapnya tidak memperdulikan ketertiban hukum dan tidak mengindahkan hasrat politik mahasiswa.

Kelompok kritis ini semakin berkembang setelah Jurgen Habermas merumuskan teori kritis, yakni paradigma komunikasi. Jika pada teori-teori marxis klasik yang menempuh jalan revolusioner untuk menjungkirbalikkan struktur masyarakat demi terciptanya masyarakat sosialis yang dicita-citakan. Habermas menempuh jalan konsensus dengan sasaran terciptanya demokrasi radikal yaitu hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam lingkup komunikasi bebas kekuasaan. Dalam kontes ini, perjuangan kelas diganti dengan perbincangan rasional melalui argumen-argumen yang bersifat emansipatoris.²⁵

Kelompok kritis dalam memandang media massa tidak terlepas dari konsepsinya tentang budaya. Dalam klasifikasi budaya, kelompok kritis menggunakan teori yang dipakai oleh Claude Levi-Strauss, seorang antropolog dari Perancis. Dalam membuat klasifikasi budaya, Strauss menganalisis sistem budaya pada masyarakat primitif atau masyarakat tanpa sejarah. Pendekatan Strauss ini merupakan perlawanan terhadap teori yang dikembangkan oleh kaum struktural-fungsional, terutama yang dikembangkan oleh Durkheim.²⁶ Dia menolak beberapa pandangan Durkheim dan pengikutnya yang menggambarkan masyarakat seperti organisasi dan mekanisme yang sunyi dari adanya konflik. Dari kritik tersebut, kemudian Strauss mengembangkan strukturalisme antropologi.

²⁴ Michael Gurevitch, *Culture.....*, hal. 42.

²⁵ Onong Uchjana effendy, *Ilmu.....*hal. 405.

²⁶ James Boon, "Claude Levi Strauss, dalam Quentin Skinner (Ed), *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*, London: University Press, 1985, hal. 169.

Dalam analisisnya, Strauss mengikuti alur berpikir atau pendekatan yang digunakan oleh Ferdinand de Saussure, ahli linguistik dari Swiss tentang sains tanda (*science of sign*). Saussure membuat perbedaan antara linguistik baku (sinkronik) dan linguistik evolusioner (diakronik). Dalam memahami teks, analisis sinkronik melihat adanya pola berlawanan yang terpasang dan terpendam dalam teks (struktur paradigmatis), sementara analisis diakronik memusatkan perhatian pada rangkaian peristiwa atau kejadian (struktur sintagmatis).

Lebih jauh Strauss mengemukakan bahwa analisa sintagmatis teks memperlihatkan makna yang manifest (nyata), sedangkan analisa paradigmatis teks memperlihatkan makna yang laten. Struktur yang nampak dari teks melihat situasi apa yang terjadi disana, sementara struktur laten berisi teks tersebut bicara tentang apa. Satu hal yang menarik dari Strauss adalah bagaimana narasi diorganisir dan bagaimana pengorganisasian tersebut menghasilkan makna.²⁷ Makna adalah sebuah produk atau praktek sosial. Dunia dibentuk oleh makna. Melalui makna yang diciptakan, bahasa dan realitas sosial dapat dipahami.

Pertanyaan dasar terkait dengan klasifikasi budaya adalah bagaimana membuat jarak antara makna khusus peristiwa dengan klasifikasi budaya. Levi Strauss mengatakan bahwa pengertian bergantung tidak hanya pada makna intrinsik yang berhubungan dengan term khusus, melainkan juga pada susunan dari elemen-elemen yang saling terkait dalam perbincangan. Oleh karena itu, tugas seorang peneliti dalam membuat sistem klasifikasi adalah menunjukkan pesan yang tersembunyi dengan cara memecahkan kodenya. Inilah sebuah gerakan dari isi kepada struktur atau dari makna manifest kepada tingkatan kode (makna laten).

Dari konsepsi Levi-Strauss ini, di kalangan kelompok kritis lahir satu definisi baru tentang ideologi, yakni sebuah sistem penandaan realitas yang bekerja secara otonom untuk menghubungkan kesadaran para agennya dalam memandang realitas sosial.

Menurut teori bahasa konvensional atau konstruktivis, realitas dapat dipahami sebagai akibat atau efek dari bagaimana sesuatu itu ditandai (*signified*). Pendekatan ini lebih melihat realitas sebagai sesuatu yang empiris. Karenanya, hasil kerja yang bisa dicapainya adalah pengetahuan

²⁷ Arthur Asa Berger

yang bersifat pragmatis. Bagaimana proses pengakuan yang terkait dengan perbincangan sosial yang tampak di masyarakat, seperti perbincangan yang ada pada media visual seperti televisi. Teori ini tampaknya tidak bisa memberikan solusi.

Dari sanalah kemudian kelompok kritis mengembangkan konsepsinya tentang realitas perbincangan. Menurut pendekatan linguistik, logika perbincangan bergantung kepada rujukan (*referencing*). Rujukan di dalam sistem narasi dihasilkan dari sejumlah pengetahuan umum yang ada pada masyarakat. Makna tidak bergantung pada bagaimana sesuatu itu ada, tetapi bagaimana sesuatu itu ditandai.

Dalam proses penandaan, ada tiga hal penting yang seringkali menimbulkan masalah sebagai berikut. *Pertama*, ada kemungkinan bahasa memiliki referensi yang multi tentang realitas dunia. *Kedua*, makna sekali waktu menimbulkan problem ketika bahasa tidak bersifat fungsional dan akibat terjadi pertentangan sosial. *Ketiga*, mekanisme di dalam tanda dan bahasa kemungkinan terjadi pertentangan. Pertentangan tersebut berimplikasi pada pertentangan kelas dan pada akhirnya ideologi memainkan peranan penting.

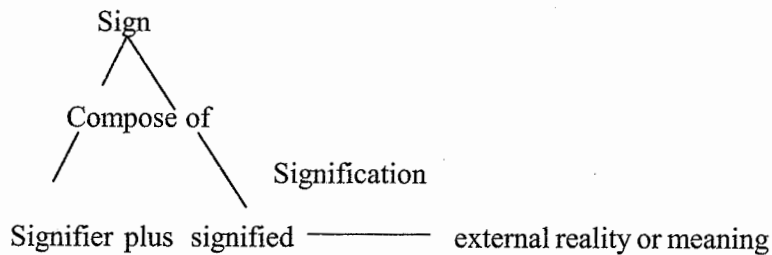
Untuk memperluas pemahaman tentang realitas perbincangan, kelompok kritis menggunakan pendekatan semiotik. Menurut John Fiske, semiotik memiliki tiga wilayah kajian. *Pertama*, kajian tentang tanda itu sendiri yang membahas tentang berbagai macam tanda yang berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan makna yang berbeda dan terkait dengan orang yang menggunakannya. *Kedua*, sistem tanda yang diorganisir yang meliputi kajian tentang berbagai macam tanda yang dapat dikembangkan di dalam tatanan budaya atau masyarakat atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang layak untuk penyebaran budaya. *Ketiga*, budaya sebagai tempat kode dan tanda itu beroperasi.²⁸

Berkenaan dengan studi media tentunya teks dianggap sebagai tanda yang dapat dianalisa. Menurut pendekatan semiotik, kehadiran teks tidak terlepas dari faktor luar yang mempengaruhi kehadiran teks tersebut. Dengan kata lain, sebuah pesan media massa tidak hanya dipahami dari isi pesan tersebut, tetapi juga perlu dipahami faktor luar yang memproduksi

²⁸ John Fiske, *Introduction to Communication Studies*, (London: Mithuen, 1982), hal. 43.

pesan media dan pembaca dari pesan media tersebut sehingga makna yang ditangkap dari pesan media menjadi utuh.

Hal ini sejalan dengan pemahaman yang diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure seperti terdapat pada bagan berikut ini:



Bertitik tolak dari penjelasan di atas, pendekatan semiotik adalah pendekatan yang dominan dalam paradigma kritis. Pendekatan semiotik adalah pendekatan yang mengkaji tentang relasi antara elemen yang membangun simbol dengan sistem yang lebih luas yang di dalamnya bentuk simbol atau tanda tersebut menjadi bagiannya. Analisa semiotik umumnya mencakup abstraksi metodologis dari kondisi sosio-historis produksi dan persepsi bentuk-bentuk simbol.

Berkenaan dengan simbol tentunya tidak terlepas dari siapa yang memproduksi, menginterpretasikan, dan memakai simbol tersebut. Dari sinilah ideologi memainkan peranan penting. Dalam prosesnya, pertama ideologi dapat direalisasikan melalui aksan bahasa dari tanda bahasa yang sama. Dalam hal ini, bahasa tidak hanya dalam bentuk lisan, melainkan juga dalam bentuk tulis. Selanjutnya, melalui ideologi dan bahasa ini hubungan yang intim akan berlangsung atau dengan perkataan lain terjadi artikulasi ideologi di dalam dan melalui bahasa dan perbincangan. Kedua, melalui perbincangan dapat memunculkan arena pertentangan sosial. Arena ini tidak menunjukkan adanya kelas, seperti yang ada pada teori marxis. Seluruh perbincangan membawa premis tertentu tentang dunia, maka masing-masing individu atau kelompok mengartikulasikan perbincangan tersebut dari posisi yang berbeda. Jadi pertentangan ideologi yang terjadi lebih menekankan pada pertentangan dalam mengartikulasikan makna. Contoh, kata demokrasi bisa diartikulasikan dalam makna yang berbeda, apakah demokrasi ala Amerika, demokrasi ala Iran, atau demokrasi ala Indonesia.

Selain ideologi berperan dalam artikulasi makna yang ada di dalam teks media massa, ideologi juga berperan dalam praktek-praktek pembentukan sosial. Menurut paradigma kritis, pembentukan sosial tidak terlepas dari adanya konsensus di antara masyarakat. Dalam konsensus tersebut, faktor kekuatan dan hegemoni tidak dapat diabaikan. Dari sanalah ideologi berperan dalam proses pembentukan sosial. Ideologi bagi paradigma kritis dipahami sebagai *a function of the discourse and of the logic of social process* (fungsi dari perbincangan dan proses sosial yang logis). Dalam hal ini, media berperan sebagai institusi yang dapat membantu menghasilkan proses pembentukan konsensus.

Tulisan Gramsci tentang hegemoni cukup menarik untuk dipakai dalam menganalisa keterkaitan hegemoni dengan media. Ada tiga aspek dinamika kultural dari hegemoni, yaitu: pertama, hegemoni merupakan sebuah proses kehidupan artinya ide hegemoni bukanlah ide yang lepas dari kepala manusia, tetapi hegemoni merupakan praktek budaya dan individu yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Kedua, hegemoni adalah persoalan *common sense*. Ketiga, hegemoni senantiasa diperjuangkan. Dari pendapat Gramsci tersebut, dapat dimaknai bahwa orang yang memiliki ekonomi kuat atau industri media raksasa dapat memperjuangkan terus menerus agar dapat menguasai media massa.

Penutup

Demikian gambaran singkat tiga kelompok besar dalam mengkaji relasi antara ideologi dengan media. Terjadinya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya terletak pada sudut pandang (perspektif) yang berbeda dari masing-masing kelompok tentang ideologi dan budaya atau struktur yang membentuk masyarakat. Selain itu, perbedaan tersebut juga tidak terlepas dari latar belakang sejarah dimana masing-masing kelompok tersebut hidup dan berkembang. Kelompok Marxis yang hidup dan berkembang di negara-negara komunis lebih menekankan kepada pertarungan kelas, sedangkan kelompok liberal-pluralis yang hidup di wilayah Amerika dan Inggris lebih mengedepankan kebebasan dan kajian-kajian yang bersifat empiris dan sosiologis. Sementara itu, kelompok kritis hidup di wilayah Jerman dan Prancis yang *nota bene* penuh dengan kajian yang bersifat filosofis. Perbedaan-

perbedaan tersebut jelas akan mempengaruhi kajian tentang media massa. Sebagai bagian dari elemen yang ada di masyarakat, eksistensi dan kajian tentang media massa tidak terlepas dari eksistensi dan kajian tentang masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Allam, Stuart (Ed). *Issues in Cultural and Media Studies*. Philadelphia: Open University Press. 1999.
- Book, Cassandra L. (Ed), *Human Communication: Principles, Contexts, and Skills*, New York: St. Martin Press, 1980.
- Boon, James, "Claude Levi Strauss, dalam Quentin Skinner (Ed), *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*, London: University Press, 1985
- Devito, Joseph A, *Human Communication The Basic Course*, edisi ke-5, New York: Harper Collins Publishers, 1991.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fiske, John, *Introduction to Communication Studies*, London: Mithuen, 1982.
- Gurevitch, Michael dkk (Ed), *Culture Society and the Media*, London: Methuen & Co. Ltd., 1982.
- Jeffres, Leo W, *Mass Media Processes and Effects*, Illinois: Waveland Press Inc., 1986.
- Johnson D.P., *Teori Sosial Klasik dan Modern I*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Rahardjo, M. Dawam, "Topik Kita", dalam *Majalah Prisma* No. 6. 1985. Tahun XIV
- Rivers, William L, dkk., *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Thompson, John B, *Kritik Ideologi Global*, Yogyakarta: Ircisod, 2004